

Pelaksanaan Pelayanan Publik di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat (Study Tentang Penggunaan Bahan Bakar Minyak Pada Bagian Umum di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat)

Harly Lionard. M¹, Aji Ratna Kusuma², Muhammad Noor³

Abstract

The purpose of this study is to analyse and describe the implementation of public services at the Regional Secretariat about the use of fuel oil to the service in the General section. This research is a quantitative descriptive research and using statistical analysis techniques.

Keywords: Implementation Services, Fuel Oil, Region.

Abstrak

Tujuan Penelitian ini adalah menganalisis dan menggambarkan pelaksanaan pelayanan publik di Sekretariat Daerah tentang penggunaan Bahan Bakar Minyak terhadap pelayanan di Bagian Umum. Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan teknik analisis data statistik.

Kata Kunci : Pelaksanaan Pelayanan, Penggunaan BBM, Luas wilayah.

Di era keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat saat ini, membuat banyak pihak berlomba-lomba melakukan segala cara agar menjadi yang terbaik dan terdepan dalam eksistensinya memenuhi tanggung jawab di hadapan Publik/Masyarakat khususnya para Konsistennya. Otonomi daerah sendiri terjadi karena proses politik yang sangat panjang sebagai respon atas ketidakpuasan terhadap sistem sentralistik di bawah pemerintahan orde baru.

Seiring dengan hal tersebut membuat pemerintah daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menjadikan hal tersebut sebagai tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kutai Barat untuk mewujudkan pembangunan sesuai dengan keinginan mereka, walaupun setiap daerah mempunyai ciri khas tersendiri baik dalam hal sumber daya alam dan sumber daya manusianya. Permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah yang timbul saat ini adalah banyaknya kepentingan lokal dalam mengimplementasikan otonomi daerah dengan kondisi administrasi dan struktur politik yang ada.

Perwujudan proses pembangunan yang baik tentu perlu adanya suatu bentuk tujuan, dalam visi dan misi pembangunan kabupaten/kota sehingga tercapailah pelayanan publik dan administrasi pemerintah yang baik untuk

¹ Mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda

² Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda

³ Dosen Program Magister Ilmu Administrasi Negara Fisipol Universitas Mulawarman Samarinda

menjalankan peranannya dengan sungguh-sungguh dalam mendukung proses pembangunan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu bersamaan dengan dilakukannya pembangunan di berbagai bidang, penyempurnaan administrasi pemerintah menjadi bagian integral dari seluruh usaha pembangunan dalam proses RPIJM dan Renstra SKPD di era otonomi daerah saat ini. Ada beberapa langkah yang dipandang perlu untuk membantu proses otonomi daerah sendiri, jika kita memandang otonomi daerah sebagai pengalihan kewenangan kepada para pejabat daerah dan meningkatkan pemerintahan demokratis.

Sama halnya dengan usaha pembangunan itu sendiri, maka usaha pelayanan publik dan penyempurnaan administrasi pemerintah harus merupakan usaha yang terus-menerus. Dalam kapasitasnya tersebut maka peran Bagian Umum sebagai Pelayan dan *Regulator* harus selalu melakukan usaha komunikasi di sektor publik baik kepada masyarakat ataupun sesama aparatur pemerintah, tentunya hasil pelaksanaan penyusunan pembangunan harus juga mengagendakan pertemuan jika masyarakat ingin melakukan konsolidasi dan konsultasi ke pimpinan daerah, agar turut serta ikut berperan serta membantu proses pembangunan daerah secara fisik dan spritual. Dukungan pemerintah daerah dan Muspida sangatlah penting, karena tanpa kedua hal tersebut akan sulit dalam memprioritaskan tujuan pembangunan, terlebih dengan unsur-unsur dan fungsi pada masing-masing SKPD. Kegiatan yang membidangi Bagian Umum adalah mengurus surat menyurat yang masuk ataupun keluar dari kantor bupati, jadwal kegiatan pimpinan, mengurus segala kebutuhan pengadaan (ATK, BBM, Fasilitas Perkantoran, serta Rumah Dinas), keuangan, dan akomodasi serta transportasi. Pencapaian pelayanan Publik yang akan di laksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat harus dapat terealisasi secara efektif dan efisien, berdasarkan kebutuhan arah pembangunan yang akan menunjang pelaksanaan program SKPD.

Prosedur Pelayanan Administrasi Logistik Sebagai Bentuk Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain sedangkan melayani adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang.

Dalam melihat hal tersebut kemampuan aparatur harus terus menerus ditingkatkan, guna menyeimbangkan dengan potensi akan sumber daya alam daerah serta topografi lingkungan tempat masyarakat tinggal, dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat dipandang perlu sebagai landasan untuk mewujudkan *good governance* tersebut dengan 3 (tiga) pilar utamanya yaitu *Pemerintah, Swasta* dan *Masyarakat* (Dr.Pandji

Santoso, Administrasi Publik). Syarat mutlak bagi terciptanya *good governance*, paling tidak meliputi transparansi, akuntabilitas dan pemerintahan yang partisipatif, sehingga pelaku birokrasi akan mampu melaksanakan fungsinya dalam kerangka *good governance*. Bila diciptakan suatu sistem administrasi publik yang kooperatif dengan pendekatan dari pelayanan publik bagi yang menerima pelayanan masyarakat maka pelaku pelayanan publik akan dapat memahami serangkaian aktivitas pekerjaan birokrasi dari interaksi yang melibatkan pegawai atau peralatan yang disediakan oleh instansi/lembaga penyelenggara pelayanan dalam menyelesaikan masalah pelayanan.

Menurut Laksono (1999:79). "*Pelayanan berasal dari kata layan yang berarti menolong, membantu, melayani. Jadi pelayan disini dapat diartikan sebagai pelayan yang diberikan untuk membantu masyarakat yang memerlukan*". Bersamaan dengan hal tersebut dapat diperoleh pengertian yang mendalam tentang pelayanan secara sesungguhnya kepada publik. Sedangkan pendapat Moenir (2001:16). "*pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan orang lain melalui aktivitas secara langsung. jadi dapat dikatakan pelayan adalah merupakan serangkaian kegiatan guna memenuhi kebutuhan orang*".

Dalam melakukan pelayanan kepada publik, tentu diperlukan prosedur dalam pelaksanaannya agar proses pelayanan bisa berjalan tertib dan sesuai aturan. Prosedur dapat diartikan sebagai suatu rangkaian cara yang disatukan dan menjadi pola yang tetap dalam pelaksanaan setiap pekerjaan dan menjadi acuan bagi setiap pegawai untuk melaksanakan pekerjaannya, baik pada organisasi pemerintah maupun pada organisasi swasta. Prosedur yang disusun dengan tepat tentu akan membantu membimbing pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga tidak salah langkah, pembagian kerja dan frekuensi kerja diatur dengan sebaik-baiknya serta menghindari adanya pekerjaan yang tumpang tindih antar bidang dalam mencapai tujuan organisasi. Soedjadi mengemukakan pendapatnya mengenai prosedur dalam bukunya (Organization and Methods) Penunjang Berhasilnya Proses Manajemen (1993:84) Prosedur adalah rangkaian dari tata kerja yang berurutan tahap demi tahap serta jelas menunjukkan arah atau arus (*flow*) yang harus ditempuh dari mana pekerjaan berasal kemana diteruskan dan kapan atau dimana selesainya dalam rangka penyelesaian suatu bidang pekerjaan atau tugas. Terry alih bahasa Winardi dengan bukunya Asas-asas Manajemen (1986:221) mendefinisikan prosedur adalah sebagai suatu seri tugas-tugas yang berhubungan satu sama lain yang merupakan bagian daripada urutan kronologis dan cara yang ditetapkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan.

Bidang Umum dalam suatu pemerintahan daerah berperan dalam memenuhi misi logistik atau pemenuhan logistik pemerintahan agar pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Misi Logistik adalah "mendapatkan barang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan jumlah yang tepat, kondisi yang tepat, dengan biaya yang terjangkau, dengan tetap memberikan

kontribusi profit bagi penyedia jasa logistik”. Menurut Mustafa (2001:42) Administrasi Logistik adalah kegiatan pengelolaan barang dalam melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan barang atau dengan kata lain melaksanakan fungsi-fungsi manajemen barang untuk memperoleh keuntungan/manfaat maksimum dari penggunaan barang.

Dalam setiap penyelenggaraan organisasi perlu adanya persiapan yang matang , agar berbagai fungsi dan dalam menjalankan berhasil. Setiap organisasi membutuhkan berbagai sarana dan prasarana, semakin beraneka ragam fungsi, tugas dan kegiatan yang harus diselenggarakan semakin beragam pula sarana dan prasarana yang di gunakan. (Sondang P.Siagian,2001).

Metode Penelitian

Dari permasalahan yang dikemukakan, jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi (Narbuko, 2005:44).

Dalam penelitian kuantitatif, proses pelaksanaan secara linear, mulai dari latar belakang masalah, merumuskan masalah, kemudian merumuskan hipotesis, penyusunan instrument penelitian, menentukan populasi dan subjek penelitian, melaksanakan pengumpulan data dan analisis data, terakhir pelaporan hasil penelitian. Untuk melakukan analisis kuantitatif, peneliti harus mampu memahami bentuk statistik yang digunakan dalam penelitian sebelum memulai analisis data statistik merupakan alat bantu yang digunakan peneliti untuk mendeskripsikan, menjelaskan dan memahami hubungan antara variable-variabel yang diteliti

Visi dan Misi Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kutai Barat

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Berikut ini adalah visi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat : “ *Pelayanan Prima dengan ditunjang sistem yang baik, aparatur yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai menuju Pemerintahan yang baik.* “

Visi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat harus dapat mendukung visi dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat. Untuk mewujudkan Kabupaten Kutai Barat sebagai Kabupaten yang masyarakatnya sejahtera, sehat, cerdas dan produktif berbasis ekonomi kerakyatan, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dengan segenap pendukung pemerintahannya seperti dinas, badan dan kantor memerlukan sistem penataan dan pembinaan umum jabatan dan formasi jabatan yang efektif dan efisien. Sistem penataan dan pembinaan tersebut yang harus dimiliki dan disediakan oleh Bagian Umum Sekretariat Kabupaten Kutai Barat kepada

para *stakeholders* sesuai mandat yang diterimanya sebagai perencana pembangunan.

Misi adalah jalan pilihan (*the chosen track*) suatu organisasi untuk menyediakan produk/jasa bagi masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah. Misi merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya misi diharapkan seluruh aparat dan masyarakat yang berkepentingan dapat mengenal program-program Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat, dan ikut serta berperan agar diperoleh hasil sesuai misi yang sudah dirumuskan. Proses perumusan misi dilakukan dengan memperhatikan masukan dari pihak yang berkepentingan dan memberikan peluang untuk perubahan sesuai dengan tuntutan lingkungan.

Kebijakan adalah merupakan ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Pemerintah Daerah.

Tugas Pokok Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat

Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat memiliki tugas pokok, yaitu:

- 1) Melaksanakan Sebagian tugas Asisten Administrasi Umum untuk membantu Sekretaris Daerah dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan di bidang umum, rumah tangga, tata usaha pimpinan, protokol, serta telekomunikasi daerah dan persandian.
- 2) Untuk menyelenggarakan tugas Bagian Umum mempunyai fungsi:
 - a) Penyelenggaraan urusan rumah tangga Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretaris Daerah.
 - b) Penyelenggaraan keprotokolan pertelekonikasi dan persandian Sekretariat Daerah.

Pelaksanaan pelayanan publik yang tercantum dalam peraturan Bupati tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas jabatan struktural di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Barat nomor 56 Tahun 2008, memberikan terperinci tentang hal-hal yang perlu dilaksanakan aparatur Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan ditegaskan lagi dalam Peraturan Pemerintah RI dalam undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik, pada pasal 3 yaitu Ruang lingkup Pelayanan Publik meliputi :

- 1) Pelayanan Barang Publik.
- 2) Pelayanan Jasa publik.
- 3) Pelayanan Administrasi.

Sekretariat Daerah adalah tempat dimana pusat roda pemerintahan Kabupaten Kutai Barat yang didalamnya terdapat unsur staf dan Kepala Bagian yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam

menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Penggunaan Bahan Bakar Minyak di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat: Implementasi Pelayanan Publik. Profesionalitas Pelayanan Publik.

Dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan keberadaan serta tugasnya, PMK di Sekretariat Daerah memiliki tantangan sendiri dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dimana dalam meningkatkan Standar kualifikasi aparatur Pemadam kebakaran di Daerah , terdapat pada Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2009. Sehingga pemerintah sendiri bisa membuat kebijakan daerah dalam menyusun kebutuhan aparturnya yang berdaya guna dan berhasil guna. Untuk melayani kebutuhan penanganan bahaya kebakaran di masyarakat, kesiapan sumber daya manusia dalam melakukan kegiatan teknis harus juga diimbangi oleh ketersediaan peralatan yang digunakan, bahaya bencana kebakaran dan pertolongan kecelakaan kendaraan (darat dan air)/bencana alam. Peralatan merupakan hal yang penting guna menunjang fungsi yang bersifat pertolongan darurat, kemandirian PMK pada kota-kota besar dipandang penting untuk membantu masyarakat.

Bagian umum mempunyai tugas pelaksanaan administrasi perkantoran yang juga meliputi kegiatan penerangan dan aktivitas administrasi dalam mengelola suplai listrik, harus selalu siap dalam persiapan antisipasi pemadaman oleh PLN. Aktivitas di perkantoran, rumah dinas dan lampu jalan, harus selalu dapat digunakan secara baik dalam pelayanannya membutuhkan kehandalan staf yang dimiliki untuk mengoperasikan baik penggunaan peralatan komunikasi, administrasi dan transportasi. Dalam pelaksanaannya pelayanan yang diberikan staf harus memahami juga kebutuhan penggunaan BBM dalam melakukan mobilisasi kegiatan, sehingga staf dituntut dapat menyesuaikan keadaan wilayah/geografi didaerah yang akan mereka laksanakan sehingga kegiatan yang dilakukan dapat sesuai dengan penggunaan BBM.

Profesional mengandung arti bahwa aparatur pemerintah memiliki kemampuan dan keahlian serta keterampilan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing. Sekretariat Daerah melalui masing-masing bagian telah menyadari bahwa, keberadaan tugas dan fungsi memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengamankan Kebijakan Pimpinan secara profesional. Dengan melakukan koordinasi ke SKPD dan Unsur-unsur masyarakat sebelum melakukan rapat ke Pimpinan Daerah, sehingga Pimpinan akan mendapatkan hal-hal yang dianggap perlu diambil dalam memutuskan Kebijakan Pembangunan. Kompetensi profesional yang bisa diharapkan memberikan dampak kearah aparatur mampu mengikuti perkembangan Teknologi dan perubahan peraturan pemerintah.

Kejujuran dalam Melakukan Pelayanan Publik.

Aparatur pemerintah harus memiliki sikap jujur dalam setiap melakukan tugas dan tanggung jawab yang di berikan, dalam memberikan bentuk pelayanan publik aparatur pemerintah harus memberikan kepastian untuk menarik kepercayaan masyarakat. Personil PMK yang dimiliki oleh Sekretariat Daerah, selama ini mampu memberikan perhatian khusus kepada masyarakat dengan membuat Kontak Center bagi pertolongan antisipasi kebakaran. Hal ini dilakukan guna memberikan perhatian bagi pelaksanaan pelayanan pemerintah. Dengan adanya Kontak Center tersebut kepercayaan masyarakat dapat menjamin kesigapan anggota PMK untuk cepat bergerak menangani bencana. Aparatur pemerintah daerah berupaya memberikan pandangan kepada masyarakat, bahwa segala kebijakan daerah harus selalu berdasarkan keputusan peraturan yang dibuat pemerintah pusat. Hal tersebut menjadi tanggung jawab di Bagian Hukum dalam menggodok Perda Kabupaten Kutai Barat yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan di masyarakat dalam hal keterpihakan masyarakat sebagai pengguna pelayanan dapat terpenuhi.

Salah satu keterpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat adalah, penertiban penjualan BBM oleh Satpol PP. Bagian Ekonomi dengan Bekerja sama pada Dinas Perdagangan dan Perkoperasian, dalam menjamin ketersediaan Barang Publik (BBM) ditingkat masyarakat

Fasilitas Pelayanan Publik

Kualitas pelayanan publik sangat berpengaruh terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang di miliki oleh Pemadam Kebakaran Sekretariat Daerah Kutai Barat. Kesiapan personil dalam pengoptimalan peralatan yang selama ini hanya terbatas pada pemakain peralatan ringan dan sedang, seperti mobil kebakaran, mesin pompa dan alkon. Ketersediaan alat dan kendaraan yang memadai masih terkendala dengan anggaran dan keterbatasan sumber daya manusia. Adapun masih kurangnya pencapaian pelayanan kualitas pelayanan publik dapat terlihat dari ketersediaan energi listrik pada suatu gedung, karena dalam pekerjaan administrasi saat ini banyak peralatan elektronik baik sarana komunikasi, informasi, dan fasilitas gedung yang memakai suplai listrik sebagai tenaga penggerak. Kebutuhan listrik adalah hal yang pokok khususnya di daerah yang baru berkembang, sehingga bentuk pelayanan sangat berpengaruh terhadap kualitas yang akan dicapai dengan baik, dimana saat ini Kabupaten Kutai Barat masih mengalami defisit listrik.

Keberadaan Kasubbag Telkomda dan Persandian di Bagian Umum, sangatlah penting dalam menginformasikan berita lewat peralatan komunikasi SSB yang memakai signal satelite. Kemampuan dan ketersediaan peralatan tersebut telah dipersiapkan oleh pemerintah daerah untuk segera memberikan informasi Berita, Pertemuan, Peraturan-peraturan, dan hal-hal yang dianggap perlu oleh Kantor Camat. Peranan Kasubbag Pengumpulan Informasi, Penerangan dan Pemberitaan (PIP) di Bagian Humas, dalam tugas

dan fungsi memberikan kualitas pelayanan publik dapat memberikan langsung dampak kepada masyarakat dengan memakai media Radio Sendawar FM. Segala informasi tentang sosialisasi dari peraturan daerah dapat dicapai dengan cepat melalui media radio tersebut. Kemampuan Sekretariat Daerah dalam menyediakan sarana informasi bagi masyarakatnya melalui Radio Sendawar FM 104.1 (megaheart).

Inovasi Pelayanan Publik.

Pelayanan harus diimbangi dengan kemampuan dalam membuat SOP, yang telah memenuhi standar peraturan pemerintah dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat. Jumlah personil dalam pelayanan ke masyarakat membuat aparat selalu bersiaga dalam penanganan bahaya kebakaran, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah kesiapan peralatan dan air di tangki mobil. Antisipasi tersebut selalu menjadi motivasi dengan semboyan "Pantang Pulang Sebelum Api Padam". Penanganan bahaya kebakaran harus diorganisir tata cara dan tekniknya agar kerugian dari pihak masyarakat dan personil PMK dapat ditekan sekecil mungkin. Adapun kegiatan rutin oleh PMK:

- a) Mencegah bahaya kebakaran hutan dan ladang penduduk pada saat musim kering.
- b) Penyiraman median jalan dan tumbuhan akibat musim kering.
- c) Perawatan berkala mesin Nozel dan pembersihan tangki mobil.

Salah satu Pelayanan Publik untuk Aparatur di Sekretariat khususnya yang dipandang sangat penting, adalah transportasi. Bagian Umum menjadi jembatan kegiatan untuk koordinasi dan mempersiapkan acara. Fasilitas penggunaan Bahan Bakar Minyak yang dikelola oleh Bagian Umum menjadi tanggung jawab untuk pelayanan di sektor transportasi kendaraan pemerintahan dan merupakan hal yang sangat penting. Ketersediaan Bahan Bakar Minyak untuk kendaraan operasional haruslah senantiasa disiapkan, karena jika ada kegiatan yang mendesak dan memerlukan waktu yang cepat menjadi tanggung jawab personel SKPD dalam melakukan koordinasi.

Pelayanan harus diimbangi dengan kemampuan dalam mempersiapkan solusi dan menyikapi setiap permasalahan di daerahnya. Saat ini Kabupaten Kutai Barat tengah memperjuangkan masalah pengelolaan listrik di Mahkamah Konstitusi (harian Kaltim Post, 1 Oktober 2015). Dimana saat ini pemerintah daerah mengajukan uji *Judicial Review* masalah pengelolaan listrik untuk daerah sehingga pelayanan publik yang merupakan hak masyarakat dapat terpenuhi oleh pemerintah. Jika menunggu regulasi dari PLN, pemerintah daerah akan mengalami kesulitan dalam penanganan kebutuhan pokok listrik tersebut. Pemerintah telah membangun pembangkit listrik tenaga batu bara di daerah Melak untuk mengcover kekurangan pasokan listrik dari PLN.

Pelayanan publik harus melihat dan diimbangi dengan kemampuan dalam menciptakan jenis pelayanan, salah satunya dari keberhasilan yang dimiliki oleh Pimpinan Daerah ialah membuat pelayanan Puskesmas

Terapung bagi daerah pesisir Sungai Mahakam. Atas hal tersebut Bupati Kutai Barat mendapatkan penghargaan “Karya Bakti Husada Artula Bidang Kesehatan oleh Mentri Kesehatan Dr. Nafsiah Mboi, Jakarta 12 November 2012”. Dari keadaan wilayah perairan tersebut pemerintah daerah berusaha memenuhi salah satu kebutuhan dasar kesehatan masyarakat.

Kesimpulan

- a) Sekretariat Daerah harus mampu menjawab tantangan pembangunan dengan memaksimalkan kinerja aparatur pada setiap Bagian-Bagian dalam pelaksanaan kegiatan di Sekretariat Daerah. Untuk itu aparatur harus bisa mengikuti perubahan peraturan dan perkembangan teknologi dalam mencari solusi kebijakan kepala daerah, agar pembangunan tidak terbentur oleh peraturan pemerintah pusat.
- b) Kegiatan koordinasi atau memberikan informasi Perda ke masyarakat harus bisa dipahami oleh semua elemen, agar sinergi arah kebijakan pembangunan dapat dipahami dan dalam proses pengambilan kebijakan dengan tokoh-tokoh masyarakat dapat menjadikan pimpinan daerah dapat merumuskan kebijakan secara komprehensif.
- c) Kegiatan mengcover kebutuhan listrik pada 12 kantor SKPD yang telah dibangun merupakan kebijakan yang positif sehingga pemakaian BBM untuk genset harus direncanakan oleh Bagian Umum dengan baik untuk menunjang suplai listrik selama setahun kedepan.
- d) Kegiatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran di Kutai Barat menjadi tugas yang berat, untuk itu kebutuhan operasional kendaraan dinas perlu di tingkatkan dan sarana perkantoran bagi setiap pos-pos di kecamatan terjauh.

Saran

- a) Kegiatan untuk memfasilitasi stabilitas distribusi Bahan Bakar Minyak Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu kewajiban pemerintah daerah oleh sebab itu penting untuk dilaksanakan secara berkesinambungan karena merupakan alat untuk mengetahui kendala di lapangan secara riil mengenai adanya permasalahan sosial di masyarakat Kabupaten Kutai Barat yang selanjutnya dapat digunakan sebagai referensi dalam penyusunan program perencanaan pembangunan serta rekomendasi kepada pemerintah pusat.
- b) Kebijakan disparitas harga bagi BBM subsidi berdasarkan harga pasar perlu dikaji ulang karena menyebabkan faktor *profitable* dan *availability* menjadi sensitif sehingga memicu kelangkaan BBM subsidi.
- c) Pemerintah pusat harus memahami karakteristik suatu daerah dalam menciptakan peraturan, agar proses pembangunan di daerah tidak terbentur dengan apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- d) Membuka akses jalan dan komunikasi dengan memberikan kesempatan bagi pihak swasta untuk bisa mengembangkan jalan-jalan tambang dan mendirikan tower untuk akses telekomunikasi.

Daftar Pustaka

- Asep, Kartiwa. 1995. *Penyempurnaan Manajemen Pemerintahan Daerah untuk Peningkatan Pelayanan Sektor Publik*, Orasi Ilmiah Unla Bandung.
- Hughes , Richard L, et.al. 1996. *Leadership "enhancing the lessons of experience"*. Second Edition, United State Of America : Times Mirror Higher Education Group.
- Koesoemadinata. 1980. *Geologi Minyak dan Gas Bumi*, Edisi kedua jilid satu. Bandung: Institut Teknologi Bandung.
- Moenir, H.A.S. 1998. *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mustafa, Bachsan. 2001. *Pengantar Hukum Administrasi Logistik*. Jakarta: PT.Citra Aditya Bakti.
- Winarsih, Atik, dan Ratminto. 2006. *Manajemen Pelayanan Publik: Pengembangan Model Konseptual, Penerapan Citizen Charter dan SPM*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Said, Mas'ud. 2008. *Arah Baru Otonomi Daerah di Indonesia*, cetakan kedua. Malang: UMM Press.